



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM

UNIT KERJA : ANGGOTA BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENDRY ABZAN
2. Jabatan : KEPALA PUSAT HARMONISASI KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KINERJA
3. NHK : 729376

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.336.200.000

1. Tanah Seluas 285 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 2.970.000.000
2. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.069.200.000
3. Tanah Seluas 1452 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 297.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 249.535.000

1. MOTOR, HONDA BEAT STREET SEPEDA MOTOR RODA 2 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.775.000
2. LAINNYA, SEPEDA PACIFIC AVENGER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 7.760.000
3. MOBIL, HONDA/JAZZ GK5 1.5 RS CVT (CKD) MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 228.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 481.990.800

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 188.978.024

F. HARTA LAINNYA Rp. 189.565.676

Sub Total Rp. 5.446.269.500

III. HUTANG Rp. 691.183.898



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.755.085.602

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.